

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI DI KABUPATEN PANGANDARAN

Asep Nurdin Rosihan Anwar<sup>1</sup>, Ii Sujai<sup>2</sup>

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2</sup>*

E-mail: asepnurdinrosihananwar1@gmail.com

### ABSTRAK

*Era keterbukaan informasi publik telah mengubah paradigma masyarakat yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai program yang dijalankan oleh suatu pemerintahan di semua tingkat. Begitu pula dengan Desa yang saat ini mengalami transformasi menjadi lebih dinamis dan berkemajuan. Perkembangan teknologi informasi juga telah memberikan ruang perubahan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Hal ini juga merupakan kewajiban Pemerintah Desa dalam membangun dan membangun sistem informasi setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Begitu pula di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) telah mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) di beberapa desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dari data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 93 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa web-blog. Sehingga dapat dikatakan implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran belum optimal.*

**Kata Kunci:** *Sistem, Informasi, Desa. Kabupaten Pangandaran*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan pelayanan publik turut serta adaptif dengan perkembangan yang ada. Era internet menjadi salah satu penentu perubahan saat ini, khususnya berkaitan dengan

derasnya arus informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Teknologi informasi telah memberikan dampak terhadap aspek sosial budaya masyarakat. Platform digital telah menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan segala aktivitas di

kehidupan sehari-hari. Begitupula di wilayah perdesaan, kebutuhan akan internet telah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan komputer berdasarkan tingkat pekerjaan, sebagai berikut: (a) PNS/TNI/Polri 27,41%; (b) Perangkat Desa Non PNS/Honorer 17,95%; (c) Karyawan Swasta 15,89%; (d) Pensiunan 14,66%; (e) Wiraswasta 10,8%; (f) Pelajar/Mahasiswa 8,91%; (g) Tidak Bekerja 3,63%; (h) Ibu Rumah Tangga 3,22%; (i) Pedagang/Buruh/Tukang 1,80%; dan (j) Petani 1,17% (Kominfo, 2017). Berdasarkan hal tersebut peluang dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah menjadi bagian dari sebuah pelayanan data, informasi dan bahkan dapat membantu untuk pelayanan publik berbasis digital. Tetapi terdapat permasalahan yang paling mendasar, yakni berkaitan dengan infrastruktur untuk mendukung dan mempercepat koneksi internet di beberapa daerah di Indonesia.

Wilayah perdesaan seharusnya menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan agar masyarakat di perdesaan dapat terhubung dengan internet. Di daerah Kabupaten Pangandaran sendiri koneksi internet telah ada, namun beberapa wilayah Desa masih terkendala oleh sinyal internet yang kurang kuat. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam mengirim maupun mengunduh data dari internet. Selain itu dengan adanya

*smartphone* mobilitas dari masyarakat perdesaan. Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Pangandaran telah diimplementasikan.

Sistem Informasi Desa (SID) erat kaitannya dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang banyak diadopsi oleh sektor swasta. Menurut Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018) menyatakan, bahwa: Perkembangan informasi dan internet berdampak pula kepada pemerintah daerah yang harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan media internet. Sehingga muncul sebuah konsep e-government sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan tentunya saat ini kita telah memasuki era keterbukaan informasi publik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa desa yang telah mempunyai website desa.

Tetapi dari hasil observasi pendahuluan terdapat permasalahan, diantaranya akses layanan yang belum sepenuhnya secara daring, sumber daya manusia pengelola website terbatas dan akses internet yang masih terhambat oleh lemahnya sinyal atau jaringan koneksi internet. Namun demikian, hal yang menjadi urgensi dari penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi dari penerapan SID di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap tingkat pelayanan masyarakat perdesaan. Hal ini diperlukan penelitian yang mendasar untuk mendapatkan hasil yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi dalam upaya pengembangan SID di wilayah Kabupaten Pangandaran. Aksesibilitas jangkauan dari SID sendiri belum tersensus dengan rinci.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Sistem Informasi Manajemen

Dalam sebuah kerangka organisasi tidak lepas dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam mencapai sebuah tujuan dari organisasi itu sendiri. Pola manajemen atau pengelolaan di setiap organisasi tentu berbeda dan hal tersebut dikendalikan oleh pemimpin sebuah organisasi.

Namun di era digital dan internet saat ini, sebuah organisasi tidak lepas dari peran teknologi informasi dalam menjalankan segala pelayanan dan pekerjaan akan berbarengan dengan penggunaan teknologi informasi di dalamnya.

Sistem organisasi yang baik, yakni sistem yang dapat memudahkan organisasi tersebut dalam upaya pencapaian tujuan dari organisasi itu sendiri. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan data dan informasi menjadi hal yang paling penting. Analisis data dengan bantuan perangkat lunak dapat mempermudah dan mempercepat kerja, serta menyelesaikan beragam permasalahan di dalam tubuh suatu organisasi. Salah satu sistem yang telah digunakan di beberapa organisasi, baik untuk *private*

*sector* maupun *public sector*, yakni Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Menurut Susanto, Azhar (2002:68) menyatakan, Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Inilah yang menjadi dasar pentingnya implementasi dari SIM di dalam sebuah organisasi.

Pencapaian tujuan organisasi akan menjadi lebih cepat tercapai dengan penerapan SIM di dalamnya. Namun dalam penerapan SIM, tetap yang menjadi kunci utama yakni sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak.

Kompetensi dan kecapakan sumber daya manusia dalam menjalankan semua perangkat akan mempermudah dalam mendapatkan analisis data yang signifikan. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam memecahkan sebuah permasalahan tertentu, maupun keakuratan data dalam mendapatkan sebuah informasi yang valid. Kebutuhan semua orang akan akses informasi saat ini terus meningkat seiring dengan arus informasi yang begitu banyak dan cepat. Para manajer dihadapkan pada tantangan dan peluang di era digital,

dimana organisasi yang dipimpinnya dapat adaptif terhadap perkembangan zaman.

## 2. Sistem Informasi Desa

Koneksi internet di perdesaan telah memasuki era digitalisasi Desa, dimana informasi yang berkembang dari internet dapat diakses langsung oleh masyarakat perdesaan. Salah satu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, yakni dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Menurut Wilhem Wau (dalam Sulistyowati, Fadjarini dan Dibyorin Mc. Canra R, 2013) menyatakan bahwa Sistem Informasi Desa (SID) adalah informasi yang diimplementasikan melalui perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa.

Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan web sehingga informasi ini dapat diakses oleh warga. Lisensi SID dikembangkan dalam platform sistem perangkat lunak bebas dan terbuka (*free and open source software*) yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut SID dirancang untuk menyajikan informasi dan tentunya dapat membantu pelayanan sektor publik. Salah satu yang dapat diimplementasikan, yakni pelayanan kependudukan. Menurut Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, Ciske (2015) menyatakan Pelayanan

administrasi kependudukan berbasis web (*online*) atau dikenal pula dengan istilah *e-service* merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa sekaligus optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang mana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun. Inilah yang menjadi menarik tentang implementasi dari sistem informasi desa yang dapat menjangkau masyarakat desa.

Sistem informasi desa itu sendiri merupakan adopsi dari implementasi *e-government*. Menurut Pascual (dalam Sutanta, Edhi dan Ashari, Ahmad, 2012) menyatakan *e-Gov* adalah penggunaan teknologi informasi (IT) yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan bisnis, didalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur *paper-based* yang mendorong cara-cara baru dalam kepemimpinan, mendiskusikan dan menetapkan strategi, transaksi bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta mengorganisasi dan menyampaikan informasi.

Oleh karena itu dalam sistem informasi desa dapat dimanfaatkan untuk mendengarkan keinginan maupun keluhan dari masyarakat desa. Walaupun demikian terdapat kelemahan di sistem informasi desa. Sistem yang berjalan mempunyai banyak kekurangan diantaranya memungkinkan adanya kesalahan,

membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencarian data, maupun dalam proses pembuatan laporan (Priyanti, Dwi dan Iriani, Siska, 2013).

Kelemahan dalam sistem tersebut tentunya harus diperbaiki dan diatasi dalam perbaikan sistem. Sistem yang baik akan menghasilkan data yang baik pula. Menurut Mulyadi (dalam Mulyani, Widiani dan Purnama, B.E, 2015) Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Walaupun kebanyakan sistem informasi diterapkan di sebuah perusahaan, tidak tertutup kemungkinan dapat diterapkan di instansi publik. Sistem informasi di sistem informasi desa tentunya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Henry. C Lucas (dalam Astuti, Puspita. D, 2011) menyatakan bahwa sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Artinya sistem informasi desa dapat bermanfaat sebagai alat pengendali dan dasar sebagai pembuatan maupun pengambilan keputusan dalam suatu organisasi publik.

### **3. Pelayanan Publik**

Seluruh kepentingan dari masyarakat (publik) harus dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara

negara dalam berbagai sektor, salah satunya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Lukman (1999:6) menyatakan, bahwa Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung dengan seseorang orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan tersebut tentunya harus berorientasi pada masyarakat sebagai penerima layanan.

Pelayanan publik tetap menjadi prioritas bagi sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah pelayanan. Adapun pelayanan publik yang berkembang saat ini, yakni pelayanan yang berbasis website.

Menurut Nandari, B.A dan Sukadi (2014) menyatakan dengan menggunakan *website* data yang diolah bisa lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan sistem yang mana data yang di olah secara sering kali mengalami kesulitan. Dengan demikian pelayanan publik saat ini telah bertransformasi ke pelayanan digital atau daring.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data melalui: (a) Metode Kepustakaan; (b) Metode Observasi; (c) Metode Observasi (Hartono. Dkk., 2010). Selain itu, untuk mendapatkan data yang signifikan dilakukan

triangulasi data di setiap komponen penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan penelitian didapatkan hasil, sebagai berikut: (1) data sistem informasi desa di Kabupaten Pangandaran; (2) analisis data; dan (3) capaian luaran wajib dan tambahan. Data sistem informasi desa yang telah dihimpun, yakni terdapat 42 (empat puluh dua) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa dari 94 (sembilan puluh empat) desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. Artinya hanya 44,68% (persen) desa yang telah mempunyai sistem informasi desa yang terintegrasi. Sistem informasi desa yang dimiliki desa-desa tersebut terdiri dari website pemerintahan desa dengan domain .id ataupun adapula yang hanya masih berupa *web-blog*. Adapun data desa yang telah mempunyai *website* atau *web-blog* di Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa
7.	Langkaplancar	1. Pangkalan 2. Bangunjaya 3. Cimanggu 4. Karangkamiri 5. Cisarua 6. Bojong 7. Bungurraya
8.	Mangunjaya	1. Sukamaju 2. Kertajaya 3. Mangunjaya
9.	Padaherang	1. Sukanagara 2. Panyutran 3. Bojongsari 4. Cibogo 5. Sindangwangi
10.	Kalipucang	1. Tunggilis 2. Cibuluh 3. Kalipucang
11.	Pangandaran	1. Pagergunung 2. Purbahayu 3. Sidomulyo 4. Sukahurip
12.	Sidamulih	1. Pajaten 2. Kersaratu 3. Cikembulan 4. Sukaresik

Sumber: Data Penelitian, 2020.

Dari ke-42 (empat puluh dua) desa tersebut peneliti mengambil salah satu sampel tampilan dari *website* Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

**Tabel. 1 Data Desa yang Memiliki Website Di Kabupaten Pangandaran**

No	Kecamatan	Desa
1.	Parigi	1. Cintaratu 2. Selasari 3. Bojong 4. Parakanmanggu
2.	Cijulang	1. Batukaras 2. Cibanten 3. Kertayasa
5.	Cimerak	1. Masawah 2. Cimerak 3. Sukajaya 4. Mekarsari 5. Legokjawa
6.	Cigugur	1. Bunisari 2. Kertajaya 3. Campaka 4. Cimindi



**Gambar.1 Website Desa Bojong**  
 Sumber: <http://desabojong.id>, 2020.

Dilihat dari peta situs (*website*) desa tersebut telah sesuai dengan konsep sistem informasi desa yang terintegrasi dan memberikan informasi yang sesuai dengan perkembangan

(*update*). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 86 ayat (4) menyatakan, bahwa Sistem Informasi Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan peta situs dari *website* Desa Bojong, maka sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satunya, di dalam *website* tersebut terdapat menu data desa, peta desa dan berita desa. Hal ini merupakan bentuk dari transparansi informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat desa.

Manajemen yang terkomputerisasi diharapkan mampu membantu dalam penentuan kebijakan Pemerintah Desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang diterapkan tentunya akan membantu dalam setiap melaksanakan program desa yang berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya terintegrasi. Selain itu, belum semuanya mempunyai *website* desa dengan domain *desa.id*, sehingga belum *open source* untuk *output* dari SID.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan SID, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Infrastruktur; dan (3) Kesiapan Teknologi. SDM dalam

hal ini tertuju pada kurangnya operator computer di Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk infrastruktur, yakni jaringan telekomunikasi yang belum tercukupi dan untuk faktor kesiapan teknologi, yaitu belum semua orang siap dengan adanya teknologi yang diterapkembangkan. Untuk itu diperlukan edukasi dan penambahan SDM dalam peningkatan, serta optimalisasi dari Sistem Informasi Desa (SID).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, Puspita. D. 2011. Sistem Informasi Penjualan Obat pada Apotek Jati Farma Arjosari. *Jurnal Speed*.3.(4).34-39.
- Hartono (2010). Buku ajar keperawatan jiwa. *Jakarta: Salemba Medika*, 59-7.
- Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, Ciske. 2015. *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web*. *Jurnal IT CIDA*.1.(1).42-55.
- Kominfo.2017. *Survey Penggunaan TIK 2017*.Jakarta: Kominfo RI.
- Lukman, S, 1999. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Press.
- Mulyani, Widiananda dan Purnama, B.E. 2015. *Pembangunan Sistem Informasi Data Balita pada Posyandu Desa Ploso Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Speed*.7.(2).15-19.

Nandari, B.A dan Sukadi. 2014.  
*Pembuatan Website Portal Berita  
Desa Jetis Lor. IJNS.3.(3).43-47.*

Nursetiawan, I., & Garis, R. R. (2018).  
Analisis Sistem Informasi  
Manajemen Pemerintah Daerah  
Kabupaten Ciamis Dalam  
Meningkatkan Pendapatan Asli  
Daerah Dari Sektor  
Pariwisata. *Moderat: Jurnal  
Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(3),  
151-162.

Priyanti, Dwi dan Iriani, Siska. 2013.  
*Sistem Informasi Data Penduduk  
pada Desa Bogoharjo  
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten  
Pacitan.2.(4).55-61.*

Sulistiyowati, Fadjarini dan Dibyorin  
Mc. Canra R. 2013. *Partisipasi  
Warga terhadap Sistem Informasi  
Desa. Jurnal Komunikasi  
ASPIKOM.2.(1).579-597.*

Susanto, Azhar (2002). *Sistem  
Informasi Manajemen: Konsep  
dan Pengembangannya*. Lingga  
Jaya, Bandung.

Sutanta, Edhi dan Ashari, Ahmad.  
2012. *Pemanfaatan Database  
Kependudukan Terdistribusi  
pada Ragam Aplikasi Sistem  
Informasi di Pemerintah  
Kabupaten/Kota. Jurnal Ilmiah  
SISFOTENIKA.2.(1).11-20.*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014  
tentang Desa.